Vol. 4, No. 2, November 2026
EKONOMIPEDIA
JURNAL EKONOMI MANAJEMEN DAN BISNIS
https://journals.gesociety.org/index.php/ekonomipedia

PENGARUH PENDAPATAN DAERAH, BELANJA DAERAH, PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB), DAN INFLASI TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) INDONESIA TAHUN 2011-2024

The Influence of Regional Revenue, Regional Expenditure, Gross Fixed Capital Formation (GFCF), and Inflation on Indonesia's Gross Domestic Product (GDP) 2011-2024

Adista Dea Rosana[1], Nelvia Iryani[2]
[1,2]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas, Payakumbuh, Indonesia
*Penulis Korespondesi; Email: adistadearosana89@gmail.com[1], nelviairyani@eb.unand.ac.id[2]

Informasi Artikel:

Diterima 07, 27, 2026
Disetujui 07, 28, 2026
Diterbitkan 11, 10, 2026

Keywords:
Gross Domestic Product (GDP); Regional Revenue; Regional Expenditure; Gross Fixed Capital Formation (GFCF); Inflation; Autoregressive Distributed Lag (ARDL).

Kata kunci:
Produk Domestik Bruto (PDB); Pendapatan Daerah; Belanja Daerah; Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB); Inflasi; *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL).

Abstract. This study aims to analyze the effects of regional revenue, regional expenditure, gross fixed capital formation (GFCF), and inflation on Indonesia's gross domestic product (GDP) during 2011–2024. A quantitative approach was employed using secondary time-series data obtained from Statistics Indonesia (BPS), the Ministry of Finance, and Bank Indonesia. The data were analyzed using the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) method to identify short-run and long-run relationships. The results reveal cointegration among the variables. In the long run, regional revenue has a significant negative effect on GDP, while regional expenditure and GFCF have significant positive effects. Inflation has a positive but insignificant effect. In the short run, inflation has a significant negative effect at the 10% significance level, whereas the other variables have no significant effects. These findings indicate that Indonesia's economic growth is more strongly influenced by the effectiveness of regional government expenditure and increased investment. This study contributes empirical evidence by integrating regional fiscal variables, investment, and inflation into a single ARDL model.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pendapatan daerah, pengeluaran daerah, pembentukan modal tetap bruto (PMTB), dan inflasi terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia selama 2011–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder deret waktu dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia. Analisis dilakukan menggunakan metode Autoregressive Distributed Lag (ARDL) untuk mengidentifikasi hubungan jangka pendek dan jangka panjang. Hasil penelitian menunjukkan adanya kointegrasi antarvariabel. Dalam jangka panjang, pendapatan daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap PDB, sedangkan pengeluaran daerah dan PMTB berpengaruh positif signifikan. Inflasi berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan. Dalam jangka pendek, inflasi berpengaruh negatif signifikan pada tingkat 10%, sementara variabel lainnya tidak signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih dipengaruhi oleh efektivitas pengeluaran pemerintah daerah dan peningkatan investasi. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris melalui integrasi variabel keuangan daerah, investasi, dan inflasi dalam satu model ARDL.

DOI: 10.55043/ekonomipedia
Halaman: 320-343
Penerbit: Green Engineering Associates

PENDAHULUAN

Salah satu tolok ukur perkembangan suatu negara adalah laju pertumbuhan ekonominya (Marcal et al., 2024). Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator terbaik untuk mengukur kesehatan ekonomi (Fraumeni, 2017). Pentingnya kebijakan fiskal dalam perekonomian negara-negara berkembang, seperti Indonesia, semakin meningkat sebagai sarana untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong aktivitas produktif (Ridwan et al., 2025). Selain faktor fiskal, pertumbuhannya ekonomi juga diberi pengaruh dari investasi yang tercermin dalam PMTB serta stabilitas harga yang diukur melalui inflasi. Oleh karena itu, analisis yang mengintegrasikan variabel fiskal daerah, investasi, dan inflasi menjadi penting untuk memahami dinamika pertumbuhan PDB secara komprehensif (Susilawati & Wibowo, 2024).

Di Indonesia, kebijakan fiskal dijalankan melalui desentralisasi yang memberi kewenangannya pada pemda dalam mengelolanya pendapatan dan belanja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Nihayatuz Zain Sindi & Kartika Berliani 2025). Kondisi ini menuntut daerah untuk lebih mandiri dalam meningkatkan pendapatan serta lebih efektif dalam mengalokasikan belanja. Perbedaan kapasitas fiskal antarwilayah menyebabkan variasi kontribusi daerah terhadap perekonomian nasional, sehingga hubungan antara pendapatan daerah, belanja daerah, dan PDB menjadi penting untuk dikaji secara empiris. Namun, dinamika PDB tidak hanya ditentukan oleh instrumen fiskal daerah, melainkan juga oleh faktor non-fiskal seperti PMTB yang mencerminkan akumulasi investasi fisik, serta inflasi yang memengaruhi stabilitas harga dan daya beli masyarakat. PMTB berperan dalam meningkatkan kapasitas produksi nasional, sementara inflasi menjadi indikator makroekonomi yang menentukan arah konsumsi dan investasi. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif mengenai pengaruh pendapatan daerah, belanja daerah, PMTB, dan inflasi menjadi penting untuk menilai kontribusinya terhadap pertumbuhan PDB Indonesia

Meskipun pendapatan daerah, belanja daerah, dan PMTB menunjukkan tren meningkat selama periode 2011-2024, laju pertumbuhan PDB Indonesia relatif berada pada kisaran 5-6% per tahun, sementara inflasi bergerak fluktuatif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan kapasitas fiskal dan investasi belum sepenuhnya mampu ditransformasikan menjadi peningkatan output ekonomi secara optimal (Badan Pusat Statistik, 2024; Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Selain itu, perbedaan kapasitas fiskal antar daerah menyebabkan kontribusi terhadap perekonomian nasional tidak merata, sehingga efektivitas kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masih menjadi isu yang perlu dikaji lebih lanjut (Cahyadi, 2019). Inflasi yang tidak stabil juga berpotensi menekan daya beli masyarakat dan aktivitas investasi sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi (Susilawati & Wibowo, 2024).

Beberapa penelitian sebelumnya memperlihatkan pendapatan daerah serta belanja daerah ada pengaruhnya pada pertumbuhan ekonomi, meskipun besarnya pengaruh sangat bergantung pada kualitas pengelolaan fiskal. Pendapatan asli daerah berperan dalam mendorong aktivitas ekonomi melalui peningkatan kemandirian fiskal daerah. Selain itu, efektivitas belanja pemerintah daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh komposisi pengeluarannya, di mana belanja daerah terbukti memberi pengaruhnya lebih tinggi dibanding belanja modal pada pertumbuhan ekonomi (Nihayatuz Zain Sindi & Kartika Berliani, 2025). Selain itu, hubungan antara PDB dan belanja daerah bersifat dinamis dan dua arah, di mana pertumbuhan ekonomi juga dapat meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah (Imantria, 2024).

Terdapat keterbatasan penelitian yang mengkaji hubungan pendapatan daerah, belanja daerah, PMTB, dan inflasi secara simultan dalam satu model empiris dengan cakupan nasional. Sebagian besar studi sebelumnya masih terfokus pada analisis parsial atau berbasis wilayah tertentu, serta menggunakan data tingkat provinsi atau kabupaten/kota (Nihayatuz Zain Sindi & Kartika Berliani, 2025), sehingga belum memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika makroekonomi Indonesia. Selain itu, penelitian terdahulu umumnya menganalisis pendapatan daerah dan belanja daerah secara terpisah tanpa mempertimbangkan keterkaitan keduanya sebagai instrumen fiskal yang terintegrasi. Sebagian besar penelitian juga menggunakan rentang data yang terbatas sehingga belum mencerminkan perubahan dinamika fiskal, investasi, serta kondisi makroekonomi seperti inflasi dalam perekonomian Indonesia. Dengan demikian, studi ini mempunyai tujuannya guna mengisi kesenjangannya tersebut dengan menganalisa pengaruh pendapatan daerah, belanja daerah, PMTB, serta inflasi pada PDB Indonesia periode 2011-2024 (Hendana et al., 2025).

Berdasarkan penjelasan mengenai perkembangan dan tantangan yang telah disebutkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak pendapatan daerah, belanja daerah, PMTB, dan inflasi terhadap PDB Indonesia selama periode 2011 hingga 2024. Untuk mengumpulkan bukti mengenai hubungan antara variabel-variabel yang diteliti, studi ini menggunakan metode kuantitatif. Dengan demikian, peneliti mempunyai keterarikan guna melaksanakan kajian dengan judulnya "Pengaruh Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan Inflasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia Tahun 2011-2024". Studi ini tidak hanya akan memperkaya khazanah studi makroekonomi Indonesia yang terus berkembang, tetapi juga diharapkan dapat membantu pemerintah merumuskan kebijakan fiskal yang lebih baik guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaganya tetap stabil dalam jangka panjang.

METODE PENELITIAN

Studi ini memakai jenis data sekunder yang bersifat *time series*. Data sekunder merupakan data sudah diolah serta dipublikasikan oleh lembaga resmi, lalu dimanfaatkannya kembali bagi kepentingannya analisis ilmiah. Seluruh datanya dipakai pada studi ini didapat dari instansi yang kredibel dan relevan dengan variabel studi. Data Pendapatan Daerah serta Belanja Daerah didapat dari DJPK Kemneku. Lalu, datanya PDB didapat dari BPS berlandaskan PDB menurut pengeluaran ADHK dalam satuan triliun rupiah. Selain itu, variabel Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebagai indikator investasi juga diperoleh dari publikasi resmi BPS pada komponen PDB menurut pengeluaran. Variabel inflasi diperoleh dari data tahunan IHK dirilis oleh BPS melalui Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia. Seluruh data tersebut mencakup periode 2011-2024 dan digunakan untuk menganalisis hubungan empiris antara pendapatan daerah, belanja daerah, PMTB, serta inflasi pada pertumbuhan PDB Indonesia.

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah model Autoregressive Distributed Lag (ARDL). Pemilihan model ARDL didasarkan pada sifat data deret waktu yang menunjukkan tingkat integrasi yang berbeda terutama, stasioneritas pada tingkat I(0) dan pada selisih pertama I(1) sehingga model ini lebih sesuai dibandingkan metode yang mengharuskan semua variabel memiliki tingkat integrasi yang identik. Selain itu, mempertimbangkan terbatasnya jumlah observasi dalam penelitian ini, metode ARDL dipilih karena kemampuannya memberikan estimasi yang efisien meskipun ukuran sampel kecil. Selain itu, model ARDL memfasilitasi analisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang secara bersamaan serta identifikasi dinamika keseimbangan jangka panjang melalui Error Correction Term (ECT), yang menggambarkan proses penyesuaian variabel menuju keseimbangan pasca guncangan ekonomi (Labibah dkk., 2021). Sebelum model diestimasi, serangkaian langkah dilakukan, termasuk uji akar unit (Augmented Dickey-Fuller), penentuan panjang lag yang optimal, dan uji kointegrasi (Bounds test). Selanjutnya, dilakukan penaksiran hubungan jangka pendek dan jangka panjang, diikuti dengan pemeriksaan diagnostik asumsi klasik termasuk uji normalitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan multikolinearitas serta pengujian stabilitas model menggunakan CUSUM of Squares. Model ARDL yang diterapkan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\Delta \ln PDB_t = \alpha_0 + \sum_{i=1}^{p} \alpha_1 \Delta \ln PDB_{t-i} + \sum_{i=0}^{q} \alpha_2 \Delta \ln PD_{t-i} + \sum_{i=0}^{q} \alpha_3 \Delta \ln BD_{t-i} + \sum_{i=0}^{q} \alpha_4 \Delta \ln PMTB_{t-i} + \sum_{i=0}^{q} \alpha_5 \Delta INF_{t-i} + \lambda ECT_{t-1} + \varepsilon_t$$

Dimana:

Δ = *First difference*

$\ln PDB_{t-i}$ = Logaritma natural Produk Domestik Bruto (PDB) pada lag ke-i

ln PD_{t-i} = Logaritma natural Pendapatan Daerah pada lag ke-i

ln BD_{t-i} = Logaritma natural Belanja Daerah pada lag ke-i

ln $PMTB_{t-i}$ = Logaritma natural Pembentukan Modal Tetap Bruto pada lag ke-i

INF_{t-i} = Tingkat inflasi pada lag ke-i (persen)

α_0 = Konstanta (intersep) model

$\alpha_1 - \alpha_5$ = Koefisien parameter jangka pendek masing-masing variabel

ln PDB_t = Perubahan logaritma natural PDB pada periode ke-t

ECT_{t-1} = *Error Correction Term* periode sebelumnya

λ = Koefisien *Error Correction Term*

p = Panjang lag optimal variabel dependen

q = Panjang lag optimal variabel independen

i = Orde lag

t = Periode waktu

ε_t = Error term

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

1. Uji Stasioner (Uji Akar Unit)

Tabel 1 Hasil Uji Stasioner dengan Augmented Dickey-Fuller

Variabel	Level			*First difference*			Orde Integrasi
	T Stat.	Prob.	Ket.	T Stat.	Prob.	Ket.	
LN PDB	-1,162	0,6897	TS	-3,940	0,0018	S	I(1)
LN PD	-3,206	0,0197	S	-	-	-	I(0)
LN BD	-3,769	0,0032	S	-	-	-	I(0)
LN PMTB	-1.936	0,3155	TS	-3,750	0.0035	S	I(1)
INF	-1.717	0,4224	TS	-3,230	0.0183	S	I(1)

Ket.: TS = Tidak Stasioner; S = Stasioner.

Sumber: *Hasil olahan data menggunakan Stata 17, 2026.*

Melihat temuan pengujiannya stasioneritas memakai metodologi ADF memperlihatkan tidak seluruh variabel studi stasioner pada tingkatan level. Variabel Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah

mempunyai nilainya prob. masing-masing besarannya 0,0197 serta 0,0032 lebih kecil dari tingkatan sig. 5 persen, sehingga dinyatakan stasioner pada tingkatan level ataupun terintegrasi pada orde I(0). Sementara itu, variabel PDB, PMTB, serta Inflasi mempunyai nilainya prob. melebihi 0,05 hingga belum stasioner pada tingkatan level.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, dilaksanakan pengujian kembali pada tingkatan *first difference*. Hasil pengujian memperlihatkan variabel PDB memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0018, PMTB sebesar 0,0035, dan Inflasi sebesar 0,0183. Seluruh nilainya prob. tersebut tidak melebihi 0,05 hingga ketiga variabel dinyatakan stasioner pada tingkatan *first difference* atau terintegrasi pada orde I(1).

Dengan demikian, temuan pengujian stasioneritas memperlihatkan variabel pada studi ini terintegrasi pada orde berbeda, yakni I(0) dan I(1), serta tidak ada variabel yang terintegrasi pada orde I(2). Analisa ini dapat dilanjutkan ke tahap perhitungan lag optimal karena kondisi-kondisi tersebut memenuhi salah satu prasyarat untuk menggunakan model ARDL.

2. Penentuan Lag Optimal

Tabel 2 Hasil Uji Maksimum Lag

Lag	FPE	AIC	HQIC	SBIC
0	4,3e-14	-16,6031	-16,7691	-16,4518
1	**1,1e-28***	-51,0956	-52,0914	-50,1879
2		-305,392	-307,052	-303,879
3		-312,001	-313,661	-310,488
4		**-320,023***	**-321,683***	**-318,51***

Sumber: Data sekunder diolah menggunakan aplikasi statistik

Berdasarkan Tabel 2, hasil pengujian lag optimal menunjukkan bahwa lag keempat (lag 4) merupakan lag paling optimal dipakai pada model studi. Ini diperlihatkan nilainya AIC besarannya -320,023, HQIC besarannya -321,683, serta SBIC besarannya -318,51 yang merupakan nilai terkecil dibandingkan dengan lag lainnya.

Pemilihan lag 4 menunjukkan bahwa perubahan pada variabel Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan Inflasi dapat memengaruhi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia hingga empat periode sebelumnya. Dengan demikian, penggunaan lag 4 dinilai mampu menangkap dinamika hubungan antarvariabel secara lebih komprehensif sehingga menghasilkan estimasi yang lebih baik dalam model ARDL.

Berdasarkan hasil tersebut, lag 4 ditetapkan sebagai lag optimal berdasarkan pengujian VARSOC dan digunakan sebagai acuan dalam melihat dinamika sistem secara keseluruhan. Namun, untuk mengestimasi model ARDL, peneliti menggunakan teknik pemilihan lag otomatis yang mempertimbangkan nilainya AIC terendah. Karena nilainya AIC lebih rendah dibanding kombinasi lag lainnya, model ARDL(1,1,1,1,1) ditetapkan sebagai model terbaik dalam proses pemilihan model. Perbedaan antara lag optimal VARSOC dan lag pada model ARDL terjadi karena lag optimal VARSOC digunakan untuk melihat dinamika sistem secara keseluruhan, sedangkan pemilihan modelnya ARDL dilaksanakan secara otomatis berlandaskan nilainya AIC terkecil sehingga diperoleh model ARDL(1,1,1,1,1) sebagai model terbaik.

3. Estimasi Model ARDL

Tabel 3 Hasil Estimasi Model ARDL (1,1,1,1,1)

Variabel	Koefisien	Std.Error	T-Stat	Prob.
PDB (-1)	-0,3137	0,3952	-0,79	0,485
PD	-0,4825	0,1512	-3,19	0,050
PD (-1)	-0,3964	0,1752	-2,26	0,109
BD	0,6246	0,1679	3,72	0,034
BD (-1)	0,2558	0,1565	1,63	0,201
PMTB	0,5612	0,0712	7,88	0,004
PMTB (-1)	0,1953	0,2633	0,74	0,512
Inflasi	0,0018	0,0009	2,12	0,125
Inflasi (-1)	0,0035	0,0012	3,08	0,054
Konstanta	0,0170	0,0864	0,20	0,856

Sumber: Data sekunder diolah menggunakan aplikasi statistik

Melihat temuan hal tersebut didapat nilainya Fstatistik yakni 27,22 dengan prob. 0,0101 tidak melebihi tingkatan sig. 5 %. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa secara bersamaan variabel Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, PMTB, dan Inflasi ada pengaruhnya pada PDB Indonesia. Selain itu, nilainya koefisien determinasi (*R-difference*) besaran 0,9879 (98,79%) variasi PDB Indonesia bisa diberi variabel independen dipakai pada studi, lalu angka sisa 1,21% diberi penjelasan oleh faktor lainnya di luar model.

Secara parsial, variabel Pendapatan Daerah mempunyai koefisien besarannya -0,4825 dengan prob. 0,050 memperlihatkan ada pengaruhnya negatif terhadap PDB Indonesia pada tingkatan sig. 5%. Variabel Belanja Daerah mempunyai koefisien besarannya 0,6246 dengan prob. 0,034 hingga ada pengaruhnya positif signifikan pada PDB Indonesia. Selanjutnya, variabel PMTB mempunyai koefisien besarannya 0,5612 dengan prob. 0,004 memperlihatkan pengaruhnya positif signifikan pada PDB Indonesia. Sementara itu, variabel Inflasi mempunyai koefisien positif besarannya 0,0018, namun belum memperlihatkan pengaruhnya signifikan pada tingkatan sig. 5% karena mempunyai probabilitas besarannya 0,125.

Hasil estimasi ARDL(1,1,1,1,1) ini selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengujian kointegrasi melalui *Bounds Test* guna melihat apakah ada hubungannya keseimbangan jangka panjang antara variable dikaji. Jika hubungan kointegrasi terbukti ada, maka analisis dapat dilanjutkan pada pengujian hubungannya jangka pendek dan jangka panjang menggunakan ECM dalam kerangka ARDL.

4. Uji Kointegrasi (*Bounds Test*)

Tabel 4 Hasil Uji Kointegrasi (Bounds Test)

Statistic Uji	Nilai
F-statistic	5,447
t-satistic	-3,324

Sumber: Data sekunder diolah menggunakan aplikasi statistik

Selanjutnya, hasil F-statistic dibandingkan dengan nilai kritis *Bounds Test* Pesaran et al. (2001) sebagaimana disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5 Nilai Kritis ARDL Bounds Test

Tingkat Signifikansi	I(0) Lower Bound	I(1) Upper Bound
10%	2,45	3,52
5%	2,86	4,01
2,5%	3,25	4,49
1%	3,74	5,06

Sumber: Pesaran, Shin, dan Smith (2001)

Berdasarkan Tabel 4 dan Tabel 5 dikatakan nilainya Fstatistic yakni 5,447 melebihi dibandingkan nilainya Upper Bound I(1) pada seluruh tingkatan sig., termasuk pada tingkat signifikansi 1 persen yang

sebesar 5,06. Hasil tersebut memperlihatkan hipotesa nol (H0) ditolak serta hipotesa alternatif (H1) diterima. Maka dari itu, bisa dibuat simpulan ada hubungannya kointegrasi atau hubungan keseimbangan jangka panjang antara Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, PMTB, dan Inflasi pada PDB Indonesia selama periode penelitian.

Meskipun variabel-variabel yang diteliti mungkin menunjukkan fluktuasi jangka pendek, hubungan kointegrasi menunjukkan bahwa, dalam jangka panjang, variabel-variabel tersebut cenderung konvergen ke titik keseimbangan yang sama. Dengan demikian, model ARDL yang digunakan dalam penelitian ini sesuai untuk penelitian lebih lanjut mengenai interaksi jangka panjang dan jangka pendek dengan menggunakan metodologi ECM.

Hasil pengujian kointegrasi ini juga memperkuat validitas model penelitian karena menunjukkan bahwa hubungan antarvariabel yang diestimasi bukan merupakan hubungan semu (*spurious relationship*), melainkan memiliki keterkaitan ekonomi yang stabil dalam jangka panjang.

5. Analisis Hubungan Jangka Pendek dan Jangka Panjang

a. Analisis Jangka Pendek

Tabel 6 Hasil Estimasi Jangka Pendek (Short Run)

Variabel	Koefisien	Std.Error	T-Stat	Prob.
Δ(PD)	0,3964	0,1752	2,26	0,109
Δ(BD)	-0,2558	0,1565	-1,63	0,201
Δ(PMTB)	-0,1953	0,2633	-0,74	0,512
Δ(INF)	-0,0035	0,0012	-3,08	0,054

Sumber: Data sekunder diolah menggunakan aplikasi statistik

Berdasarkan Tabel 6, variabel Pendapatan Daerah mempunyai koefisien positif besarannya 0,3964 namun tidak signifikan karena memiliki nilainya prob. yakni 0,109 melebihi 5%. Artinya, fluktuasi pendapatan daerah belum secara signifikan memengaruhi perubahan PDB Indonesia dalam jangka pendek.

Variabel Belanja Daerah mempunyai koefisien negatif besarannya -0,2558 dengan prob. besarannya 0,201. Hasil tersebut memperlihatkan Belanja Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PDB Indonesia dalam jangka pendek. Demikian pula dengan variabel PMTB yang memiliki koefisien

besarannya -0,1953 dan prob. besarannya 0,512 hingga tidak menunjukkan pengaruhnya signifikan pada PDB Indonesia dalam jangka pendek.

Sementara itu, variabel Inflasi memiliki koefisien negatif besarannya -0,0035 dengan prob. besarannya 0,054. Nilainya tersebut memperlihatkan Inflasi ada pengaruhnya negatif terhadap PDB Indonesia dan signifikan pada tingkat signifikansi 10 persen. Artinya, peningkatan inflasi cenderung menurunkan pertumbuhan PDB Indonesia dalam jangka pendek.

b. Analisis Jangka Panjang

Tabel 7 Hasil Estimasi Jangka Panjang (Long Run)

Variabel	Koefisien	Std.Error	T-Stat	Prob.
PD	-0,6690	0,1804	-3,71	0,034
BD	0,6701	0,1748	3,83	0,031
PMTB	0,5758	0,0658	8,75	0,003
INF	0,0041	0,0014	2,94	0,060

Sumber: Data sekunder diolah menggunakan aplikasi statistik

Melihat hal tersebut pada variabel Pendapatan Daerah mempunyai koefisien besarannya -0,6690 dengan prob. besarannya 0,034. Temuan memperlihatkan Pendapatan Daerah ada pengaruhnya negatif dan signifikan pada PDB Indonesia dalam jangka panjang. Setiap peningkatan Pendapatan Daerah sebesar 1 persen diperkirakan akan menurunkannya PDB Indonesia besarannya 0,669 dengan asumsi variabel lain konstan.

Variabel Belanja Daerah mempunyai koefisien besarannya 0,6701 dengan prob. besarannya 0,031. Temuan memperlihatkan Belanja Daerah ada pengaruhnya positif signifikan pada PDB Indonesia dalam jangka panjang. Peningkatan Belanja Daerah besarannya 1 % diperkirakan akan meningkatkannya PDB Indonesia sebesar 0,670 persen.

Variabel PMTB mempunyai koefisien besarannya 0,5758 dengan prob. besarannya 0,003. Hasil tersebut menunjukkan bahwa PMTB berpengaruh positif signifikan terhadap PDB Indonesia dalam jangka panjang. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan investasi melalui pembentukan modal tetap bruto mampu mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan output nasional.

Sementara itu, variabel Inflasi mempunyai koefisien besarannya 0,0041 dengan prob. besarannya 0,060. Temuan memperlihatkan Inflasi ada pengaruhnya positif namun tidak signifikan pada tingkatan sig. 5 %. Akan tetapi, pada tingkat signifikansi 10 persen, variabel Inflasi masih dapat dikategorikan signifikan

sehingga menunjukkan adanya kecenderungan hubungan positif antara inflasi dan PDB Indonesia dalam jangka panjang.

6. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Berikut ini merupakan hasil uji normalitas:

Tabel 8 Hasil Uji Normalitas

Variabel	Obs	W	z	Prob > z
Residual	14	0,93892	0,241	0,4047

Sumber: Data sekunder diolah menggunakan aplikasi statistik

Melihat hal tersebut didapat nilainya (Prob > z) yakni 0,4047. Hipotesis nol, yang menyatakan bahwa residu mengikuti distribusi normal, tidak dapat ditolak karena angka ini lebih besar dari tingkat signifikansi 5% (0,05). Temuan memperlihatkan bahwa residu model ARDL dalam penelitian ini mengikuti distribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Berikut ini merupakan hasil uji heteroskedastisitas:

Tabel 9 Hasil Uji Heteroskedastisitas (*White Test*)

Statistic	Nilai
Chi-Square	13,00
Prob > Chi-Square	0,3690

Sumber: Data sekunder diolah menggunakan aplikasi statistik

Melihat hal tersebut didapat prob. yakni 0,3690. Nilainya melebihi tingkatan 0,05, hingga hipotesa nol menyebutkan homoskedastisitas tidak dapat ditolak. Maka dari itu, bisa dibuat simpulan model ARDL pada studi ini tidak mengalami masalahnya heteroskedastisitas serta pemenuhan asumsinya homoskedastisitas.

c. Uji Autokorelasi

Berikut merupakan hasil uji autokorelasi:

Tabel 10 Hasil Uji Autokorelasi (Durbin-Watson Test)

Statistic	Nilai
Durbin-Watson (DW)	2,4076

Sumber: Data sekunder diolah menggunakan aplikasi statistik

Melihat hal tersebut bisa didapat Nilai 2,4076 merupakan statistik Durbin-Watson. Karena nilainya mendekati 2, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat autokorelasi yang signifikan pada residu model. Karena model ARDL yang digunakan dalam penelitian ini tidak menunjukkan adanya autokorelasi, dapat disimpulkan bahwa model tersebut sesuai untuk analisis lebih lanjut.

d. Uji Multikolinearitas

Berikut merupakan hasil uji multikolinearitas:

Tabel 11 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF
PD	402,92
BD	406,03
PMTB	1,86
INF	0,39
Mean VIF	202,80

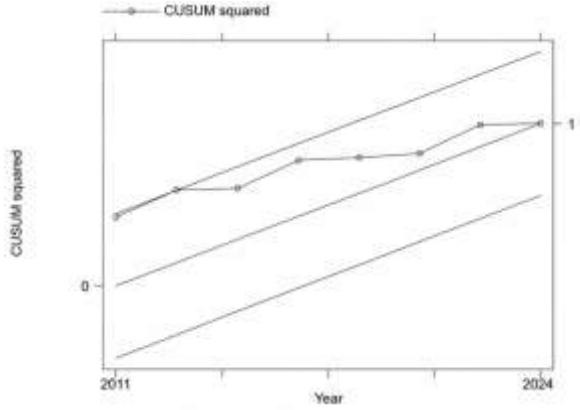
Sumber: Data sekunder diolah menggunakan aplikasi statistik

Melihat hal tersebut didapat nilainya Mean VIF yakni 202,80. Selain itu, variabel Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah memiliki nilai VIF yang jauh di atas batas umum sebesar 10. Temuan memperlihatkan ada hubungannya sangat kuat antara kedua variabel tersebut. Kondisi ini dapat terjadi karena Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah memiliki keterkaitan fiskal yang erat, di mana peningkatan penerimaan daerah pada umumnya akan diikuti oleh peningkatan pengeluaran atau belanja daerah.

Meskipun demikian, dalam pendekatan ARDL fokus utama penelitian tidak terletak pada estimasi koefisien regresi silang (cross-sectional regression), melainkan pada pengujian hubungan dinamis jangka pendek dan jangka panjang antarvariabel. Selain itu, model ARDL yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi syarat stasioneritas, memiliki hubungan kointegrasi berdasarkan hasil *Bounds Test*, serta lolos pengujian normalitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Dengan demikian, model tetap dapat digunakan untuk analisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang dengan tetap mempertimbangkan adanya korelasi yang tinggi antara variabel Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah dalam interpretasi hasil penelitian.

7. Uji Stabilitas Model

a. Uji CUSUM Difference (CUSUMQ)



Sumber: Data sekunder diolah menggunakan aplikasi statistik

Gambar 1 Hasil Uji CUSUM Square

Berdasarkan Gambar 1, terlihat bahwa garis CUSUM *Difference* berada di antara batas kritis atas dan batas kritis bawah pada tingkat signifikansi 5 persen selama periode pengamatan tahun 2011-2024 serta tidak memotong maupun keluar dari batas kritis yang telah ditentukan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model ARDL yang digunakan dalam penelitian ini bersifat stabil dan tidak mengalami perubahan struktural (*structural break*) yang signifikan. Dengan demikian, hubungan antara Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Inflasi, dan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dapat dianggap konsisten sepanjang periode penelitian, sehingga hasil estimasi jangka pendek maupun jangka panjang yang diperoleh dinilai reliabel dan layak digunakan sebagai dasar dalam analisis serta penarikan kesimpulan penelitian.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia

Berdasarkan hasil estimasi jangka panjang model ARDL, variabel Pendapatan Daerah memiliki koefisien sebesar -0,6690 dengan nilai probabilitas 0,034 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 5 persen. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Dengan demikian, hipotesis pertama penelitian yang menduga bahwa Pendapatan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB Indonesia tidak terbukti, karena arah hubungan yang diperoleh justru negatif. Secara empiris, peningkatan Pendapatan Daerah sebesar 1 persen diperkirakan akan menurunkan PDB Indonesia sebesar 0,6690 persen dengan asumsi variabel lain konstan (*ceteris paribus*). Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas fiskal daerah selama periode penelitian belum sepenuhnya mampu diterjemahkan menjadi peningkatan output ekonomi nasional.

Dalam perspektif teori keuangan publik yang dikemukakan oleh Musgrave, pendapatan daerah memiliki fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi yang bertujuan mendukung pembangunan ekonomi melalui penyediaan barang publik dan pelayanan masyarakat (Komlos, 2023). Selain itu, teori desentralisasi fiskal yang dikemukakan oleh Oates menjelaskan bahwa semakin besar kapasitas fiskal daerah, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan dan pelayanan publik (Sasana, 2019). Secara teoritis, peningkatan pendapatan daerah seharusnya memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi karena pemerintah memiliki sumber daya yang lebih besar untuk membiayai pembangunan. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan kondisi yang berbeda, yaitu pengaruh negatif dan signifikan terhadap PDB Indonesia.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Nihayatuz Zain Sindi dan Kartika Berliani (2025) yang menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, meskipun pengaruhnya tidak signifikan. Temuan penelitian ini juga berbeda dengan penelitian Fauji dan Syafitri (2024) yang menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. Kedua penelitian tersebut mendukung pandangan bahwa peningkatan penerimaan daerah akan memperkuat kapasitas pembangunan dan mendorong aktivitas ekonomi. Akan tetapi, penelitian ini menemukan hubungan negatif antara Pendapatan Daerah dan PDB Indonesia sehingga menunjukkan adanya perbedaan karakteristik hubungan fiskal pada tingkat nasional dibandingkan dengan tingkat daerah.

Perbedaan hasil penelitian ini dapat disebabkan oleh perbedaan objek, cakupan data, dan karakteristik variabel yang digunakan. Penelitian terdahulu umumnya menggunakan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) sebagai indikator kapasitas fiskal daerah, sedangkan penelitian ini menggunakan total Pendapatan Daerah yang terdiri atas PAD, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), serta pendapatan lainnya. Besarnya kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam struktur pendapatan daerah dapat menyebabkan peningkatan pendapatan daerah tidak selalu mencerminkan peningkatan kemandirian fiskal.

Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan pendapatan daerah belum sepenuhnya diikuti oleh pengalokasian sumber daya yang produktif sehingga dampaknya terhadap PDB nasional belum optimal. Besarnya pendapatan daerah yang diterima pemerintah daerah tidak secara otomatis mendorong peningkatan output ekonomi apabila sebagian besar penerimaan tersebut masih digunakan untuk pembiayaan rutin atau belum diarahkan secara efektif pada kegiatan yang mampu meningkatkan produktivitas dan investasi daerah. Selain itu, tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dapat menyebabkan peningkatan pendapatan daerah tidak selalu mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi riil di daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan fiskal daerah menjadi faktor penting dalam menentukan kontribusi pendapatan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan Pendapatan Daerah perlu diikuti dengan pengelolaan fiskal yang lebih efektif dan produktif agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah tidak hanya perlu meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga memastikan bahwa sumber-sumber pendapatan tersebut dialokasikan pada kegiatan pembangunan yang produktif, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat. Dengan demikian, fungsi fiskal daerah sebagaimana dijelaskan dalam teori Musgrave dapat berjalan secara optimal dan memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto Indonesia.

Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia

Berdasarkan hasil estimasi jangka panjang model ARDL, variabel Belanja Daerah memiliki koefisien sebesar 0,6701 dengan nilai probabilitas 0,031 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 5 persen. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Dengan demikian, hipotesis kedua penelitian yang menyatakan bahwa Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB Indonesia dapat diterima. Secara empiris, peningkatan Belanja Daerah sebesar 1 persen diperkirakan akan meningkatkan PDB Indonesia sebesar 0,6701 persen dengan asumsi variabel lain konstan (*ceteris paribus*). Temuan ini mengindikasikan bahwa

pengeluaran pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendorong aktivitas ekonomi nasional melalui peningkatan pembangunan dan pelayanan publik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Keynesian yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen utama dalam meningkatkan permintaan agregat. Menurut teori Keynesian, peningkatan belanja pemerintah akan menciptakan *multiplier effect* yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, konsumsi, investasi, dan output ekonomi secara keseluruhan (Mankiw, 2022). Selain itu, Wagner's Law menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi yang semakin maju akan diikuti oleh peningkatan peran pemerintah melalui pengeluaran publik yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pembangunan ekonomi (Yasmin & Sari, 2025). Dalam konteks penelitian ini, peningkatan Belanja Daerah mencerminkan semakin besarnya keterlibatan pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta berbagai program pembangunan yang mampu mendorong peningkatan produktivitas ekonomi.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Nihayatuz Zain Sindi dan Kartika Berliani (2025) yang menemukan bahwa Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan belanja pemerintah mampu mempercepat aktivitas ekonomi melalui pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik. Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Susilawati dan Wibowo (2024) yang menyimpulkan bahwa belanja pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut penelitian tersebut, pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan permintaan agregat sehingga mendorong peningkatan output nasional.

Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Fajriar dan Khoirunurrofik (2025) yang menemukan bahwa Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal di Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa belanja produktif memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan belanja non-produktif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Temuan serupa juga ditemukan oleh Laily et al. (2025) yang menyatakan bahwa berbagai komponen belanja pemerintah daerah, khususnya belanja infrastruktur, belanja pegawai, dan belanja subsidi, berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Hasil tersebut memperkuat argumentasi bahwa pengeluaran pemerintah daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong peningkatan aktivitas ekonomi.

Konsistensi antara hasil penelitian ini dengan teori dan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Belanja Daerah merupakan instrumen fiskal yang efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Peningkatan belanja yang diarahkan pada sektor-sektor produktif dapat memperluas kapasitas

produksi, meningkatkan kualitas infrastruktur, memperbaiki kualitas sumber daya manusia, serta menciptakan lapangan kerja baru. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa alokasi Belanja Daerah lebih difokuskan pada program-program pembangunan yang memiliki efek pengganda tinggi terhadap perekonomian sehingga kontribusinya terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto Indonesia dapat semakin optimal.

Pengaruh Pembentukan Modal Tetap Bruto Terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia

Berdasarkan hasil estimasi jangka panjang model ARDL, variabel Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memiliki koefisien sebesar 0,5758 dengan nilai probabilitas 0,003 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 5 persen. Hasil tersebut menunjukkan bahwa PMTB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Dengan demikian, hipotesis ketiga penelitian yang menyatakan bahwa PMTB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB Indonesia dapat diterima. Secara empiris, peningkatan PMTB sebesar 1 persen diperkirakan akan meningkatkan PDB Indonesia sebesar 0,5758 persen dengan asumsi variabel lain konstan (*ceteris paribus*). Temuan ini menunjukkan bahwa investasi fisik yang tercermin dalam PMTB memiliki kontribusi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas ekonomi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Teori Pertumbuhan Neoklasik Solow-Swan yang menjelaskan bahwa akumulasi modal merupakan salah satu faktor utama yang menentukan peningkatan output dalam perekonomian. Menurut teori tersebut, investasi yang dilakukan melalui penambahan stok modal seperti pembangunan infrastruktur, mesin, peralatan produksi, dan aset tetap lainnya akan meningkatkan kapasitas produksi sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi (Todaro & Smith, 2020). Dalam penelitian ini, PMTB digunakan sebagai indikator investasi fisik yang mencerminkan pembentukan modal tetap dalam perekonomian. Semakin besar investasi yang dilakukan, semakin besar pula kemampuan sektor produksi dalam menghasilkan barang dan jasa yang pada akhirnya meningkatkan Produk Domestik Bruto Indonesia. Temuan ini juga sesuai dengan penjelasan Mankiw (2022) yang menyatakan bahwa investasi merupakan komponen penting dalam pembentukan output nasional karena berperan meningkatkan produktivitas faktor-faktor produksi.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Lestari et al. (2022) yang menemukan bahwa PMTB berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan investasi fisik mampu memperluas kapasitas produksi nasional dan memperkuat pertumbuhan ekonomi. Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Desrini Ningsih & Sari (2018) yang menyimpulkan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di

Indonesia. Menurut penelitian tersebut, peningkatan investasi memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan output melalui penambahan modal produktif yang digunakan dalam kegiatan ekonomi.

Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Naila, Abbas, dan Abubakar (2023) yang menggunakan pendekatan ARDL dan menemukan bahwa investasi yang diproksikan dengan PMTB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa peningkatan PMTB mampu meningkatkan kapasitas produksi nasional sehingga berdampak langsung terhadap peningkatan PDB. Kesamaan hasil antara penelitian ini dan penelitian Naila et al. (2023) memperkuat bukti empiris bahwa investasi fisik merupakan salah satu faktor penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

Kesesuaian hasil penelitian dengan teori dan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa PMTB merupakan variabel yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Investasi yang diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur, pengadaan mesin dan peralatan produksi, serta peningkatan aset tetap lainnya dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dan memperluas kapasitas produksi nasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus mendorong peningkatan investasi melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penyederhanaan regulasi, peningkatan kualitas infrastruktur, serta pemberian kepastian hukum bagi investor. Dengan meningkatnya investasi yang tercermin dalam PMTB, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat tumbuh secara lebih kuat dan berkelanjutan.

Pengaruh Inflasi Terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia

Berdasarkan hasil estimasi jangka panjang model ARDL, variabel Inflasi memiliki koefisien sebesar 0,0041 dengan nilai probabilitas 0,060. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Inflasi berpengaruh positif namun tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Dengan demikian, hipotesis keempat penelitian yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDB Indonesia tidak terbukti. Meskipun arah hubungan yang diperoleh adalah positif, pengaruh inflasi terhadap PDB relatif kecil dan secara statistik tidak cukup kuat pada tingkat kepercayaan 95 persen. Temuan ini mengindikasikan bahwa perubahan tingkat inflasi selama periode penelitian belum menjadi faktor utama yang menentukan perubahan Produk Domestik Bruto Indonesia dibandingkan variabel lainnya seperti Belanja Daerah dan PMTB.

Secara teoritis, hasil penelitian ini tidak sepenuhnya sesuai dengan *Quantity Theory of Money* yang dikemukakan oleh Irving Fisher. Teori tersebut menjelaskan bahwa peningkatan jumlah uang beredar yang mendorong inflasi secara berlebihan dapat menyebabkan kenaikan harga secara umum dan berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi (Fisher, 1911). Selain itu, dalam perspektif makroekonomi modern, inflasi

yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat, meningkatkan biaya produksi, serta menciptakan ketidakpastian ekonomi yang menghambat investasi dan pertumbuhan output (Mishkin, 2019; Mankiw, 2022). Oleh karena itu, dalam kerangka teori yang digunakan pada penelitian ini, inflasi diperkirakan memiliki hubungan negatif terhadap PDB. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan hubungan positif meskipun tidak signifikan, yang mengindikasikan bahwa tingkat inflasi di Indonesia selama periode penelitian masih berada dalam kondisi yang relatif terkendali sehingga belum memberikan tekanan yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Susilawati dan Wibowo (2024) yang menemukan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa kenaikan inflasi menyebabkan penurunan daya beli masyarakat sehingga mengurangi aktivitas ekonomi. Temuan penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian Putra dan Rahayuningsih (2024) yang menggunakan metode VECM dan menemukan bahwa inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Kedua penelitian tersebut mendukung pandangan bahwa inflasi yang meningkat akan memberikan dampak negatif terhadap output ekonomi.

Namun demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yuli Dwi Rahayu, Siti Amalia, dan Rian Hilmawan (2026) yang menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap PDB Indonesia dalam model ARDL. Kesamaan hasil tersebut mengindikasikan bahwa selama periode tertentu, inflasi yang relatif stabil dan masih berada dalam rentang sasaran kebijakan moneter tidak selalu memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam kondisi tersebut, perekonomian masih mampu mempertahankan aktivitas produksi dan investasi meskipun terjadi kenaikan harga secara umum.

Perbedaan hasil penelitian ini dengan sebagian penelitian terdahulu dapat disebabkan oleh perbedaan periode pengamatan, metode analisis, serta kondisi perekonomian yang diamati. Selama periode 2011-2024, tingkat inflasi Indonesia secara umum berada dalam kondisi yang relatif terkendali berkat kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia. Stabilitas inflasi tersebut memungkinkan aktivitas konsumsi, investasi, dan produksi tetap berjalan dengan baik sehingga dampak inflasi terhadap PDB menjadi relatif kecil. Oleh karena itu, meskipun inflasi tetap perlu dijaga pada tingkat yang stabil, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor investasi melalui PMTB dan kebijakan fiskal melalui Belanja Daerah memiliki peran yang lebih dominan dalam memengaruhi Produk Domestik Bruto Indonesia dibandingkan inflasi selama periode penelitian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang menerapkan metode *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL), disimpulkan bahwa model tersebut menunjukkan hubungan baik jangka pendek maupun jangka panjang antara pendapatan daerah, belanja daerah, pembentukan modal tetap bruto (PMTB), inflasi, dan produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Dalam periode singkat, hanya inflasi yang memberikan efek negatif yang berarti (pada level signifikansi 10%), sedangkan pendapatan daerah, pengeluaran daerah, dan pembentukan modal tetap bruto tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PDB. Selain itu, hasil pengujian bounds dan *error correction term* (ECT) mengkonfirmasi adanya kointegrasi serta proses penyesuaian menuju keseimbangan jangka panjang.

Dalam jangka panjang, pendapatan daerah berpengaruh negatif secara signifikan terhadap PDB, sementara belanja daerah dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) berkontribusi secara positif yang signifikan. Sebaliknya, inflasi memberikan pengaruh positif tetapi tidak signifikan secara statistik terhadap PDB. Hasil-hasil ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih dipicu oleh efisiensi belanja pemerintah daerah dan investasi dibandingkan dengan peningkatan pendapatan daerah atau perubahan tingkat inflasi. Oleh sebab itu, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pemerintah harus mengoptimalkan kualitas belanja daerah yang produktif, mendorong investasi, dan memperkuat pengelolaan pendapatan daerah. Untuk penelitian berikutnya, disarankan agar menggunakan periode observasi yang lebih lama dan menambahkan variabel makroekonomi lainnya untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif.

SINGKATAN YANG DIGUNAKAN

ARDL (Autoregressive Distributed Lag)

ADF (Augmented Dickey-Fuller)

BPS (Badan Pusat Statistik)

ECT (Error Correction Term)

GDP (Gross Domestic Product)

IHK (Indeks Harga Konsumen)

Kemenkeu (Kementerian Keuangan Republik Indonesia)

PDB (Produk Domestik Bruto)

PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto)

TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa)

PERNYATAAN KETERSEDIAAN DATA

Data yang mendukung hasil penelitian ini merupakan data sekunder berbentuk data runtut waktu (time series) periode 2011-2024 yang diperoleh dari publikasi resmi lembaga pemerintah. Data Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan (ADHK), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan Inflasi diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara itu, data Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui publikasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini tersedia secara terbuka untuk kepentingan akademik melalui situs resmi masing-masing lembaga, yaitu Badan Pusat Statistik (https://www.bps.go.id) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (https://djpk.kemenkeu.go.id). Data tersebut digunakan untuk menganalisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang antara Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, PMTB, Inflasi, dan Produk Domestik Bruto Indonesia menggunakan metode Autoregressive Distributed Lag (ARDL).

KONTRIBUSI PARA PENULIS

Adista Dea Rosana: konseptualisasi, pengumpulan dan kurasi data, investigasi, analisis formal, metodologi penelitian, pengolahan data, visualisasi, penyusunan draf awal, serta penulisan, peninjauan, dan penyuntingan naskah.

Nelvia Iryani: supervisi penelitian, validasi hasil penelitian, konseptualisasi, metodologi, serta peninjauan dan penyuntingan naskah.

PERNYATAAN KONFLIK KEPENTINGAN

Para penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan maupun kepentingan yang bersaing dalam proses penelitian, penyusunan, dan publikasi artikel ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nelvia Iryani selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingan selama proses penyusunan dan penyelesaian penelitian ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), serta Bank Indonesia yang telah menyediakan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2024). Produk Domestik Bruto Indonesia 2010-2024 (Atas Dasar Harga Konstan 2010). BPS Indonesia. https://www.bps.go.id/id/publication/2025/05/28/2a1c585ebbd574dd91afed67/produk-domestik-bruto-indonesia-menurut-pengeluaran-2020-2024.html

Bank Indonesia. (2024). Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI). Bank Indonesia. https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/Default.aspx

Cahyadi, E. D. (2019). Fiscal Decentralisation and Economic Growth in Indonesia. 5(3), 320-327. https://doi.org/10.21776/UB.JIAP.2019.005.03.8

Durbin, James, & Watson, Geoffrey Stuart. (1951). Testing for serial correlation in least squares regression II. Biometrika, 38(1–2), 159–178. https://doi.org/10.1093/biomet/38.1-2.159

Fajriar, A., & Khoirunurrofik, K. (2025). The effect of local government spending behavior on local economic growth in Indonesia. Journal of Economics and Sustainable Policy, 17(2). https://journal2.um.ac.id/index.php/JESP/article/view/51267

Fajriar, R., & Khoirunurrofik, M. (2025). Analisis belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi daerah. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 18(1),45-60. https://journal2.um.ac.id/index.php/JESP/article/view/51267

Fauji, Z., & Syafitri, W. (2024). The impact of local governance and regional own-source revenue on economic growth at the district level in Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 27(2). https://doi.org/10.24914/jeb.v27i2.11606

Fisher, I. (1911). The purchasing power of money. New York: Macmillan. https://archive.org/details/purchasingpower00fish

Fraumeni, B. M. (2017). Gross domestic product: Are other measures needed? The IZA World of Labor. https://doi.org/10.15185/IZAWOL.368

Hendana, D., Indrayani, L., Anggraini, A., Daniyal, D., & Amelia, R. W. (2025). Fiscal Decentralization on Economic Growth (A Systematic Literature Review). Jurnal Ekonomi Pembangunan, 14 (1), 32-52. https://doi.org/10.23960/jep.v14i1.3950

Imantria, B. (2024). Does economic growth lead to government expenditure in Indonesia? https://www.researchgate.net/publication/391656881_Does_Economic_Growth_Lead_To_Government_Expenditure_in_Indonesia

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Data Realisasi APBD Nasional 2010-2024. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. https://djpk.kemenkeu.go.id/?page_id=8851

Komlos, J. (2023). Viability of the Political System: A Neglected Issue in Public Finance. Challenge: The Magazine of Economic Affairs, 1-10. https://doi.org/10.1080/05775132.2023.2179166

Labibah, S., Jamal, Abd., & Dawood, T. C. (2021). Indonesian Export Analysis: Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Model Approach. Journal of Economics, Business, and Accountancy | Ventura, 23(3), 320-328. https://doi.org/10.14414/JEBAV.V23I3.1668

Lestari, D. N., Indrawati, L. R., & Jalunggono, G. (2022). Analisis pengaruh inflasi, pembentukan modal tetap bruto dan pengeluaran konsumsi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. DINAMIC: Directory Journal of Economic, 3(1). https://jom.untidar.ac.id/index.php/dinamic/article/view/2676

Mankiw, N. G. (2022). Macroeconomics (11th ed.). New York: Worth Publishers. https://books.google.com/books?id=wPw7zgEACAAJ

Marcal, I. A. F., Oentoro, Y. P., & Yasin, M. (2024). Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Cerminan Perkembangan Perekonomian Suatu Negara. Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi, 2(3), 40-47. https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i3.1898

Mishkin, F. S. (2019). The economics of money, banking, and financial markets (12th ed.). Pearson. https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/economics-of-money-banking-and-financial-markets-the-global-edition/P200000005051

Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). Public Finance in Theory and Practice. McGraw-Hill. https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/economics-of-money-banking-and-financial-markets-the-global-edition/P200000005051

Ningsih, D., & Sari, S. I. (2018). Pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Batam. Jurnal Akuntansi Barelang, 3(1), 21-31. https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/jab/article/view/842

Pesaran, M. Hashem, Shin, Yongcheol, & Smith, Richard J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. https://doi.org/10.1002/jae.616

Putra, T., & Rahayuningsih, E. S. (2024). Pengaruh inflasi, kurs, dan investasi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia: Analisis model VECM (1993-2023). Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah, 7(1). https://doi.org/10.55352/ekis.v7i1.1522

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Republik Indonesia. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022

Ridwan, M., Khasanah, N., Schaffer, W., & Kholid, A. R. (2025). Kebijakan fiskal dan pengaruhnya terhadap perekonomian negara indonesia. Central Publisher, 2(8), 2372-2379. https://doi.org/10.60145/jcp.v2i8.491

Sasana, H. (2019). Fiscal Decentralization and Regional Economic Growth. Economics Development Analysis Journal, 8(1), 108-119. https://doi.org/10.15294/EDAJ.V8I1.29879

Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. The Quarterly Journal of Economics. https://doi.org/10.2307/1884513

Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. Quarterly Journal of Economics, 70(1), 65-94. https://doi.org/10.2307/1884513

Susilawati, S., & Wibowo, M. G. (2024). The effect of inflation, government spending and exports on economic growth in Indonesia. Jurnal Manajemen Ekonomi Syariah, 3(2). https://doi.org/10.14421/jmes.2024.032-03

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). Economic Development (13th ed.). Pearson. https://www.pearson.com/en-gb/subject-catalog/p/Todaro-Economic-Development-13th-Edition/P200000005609/9781292291192

Wagner, A. (1893). Grundlegung der politischen Ökonomie. Leipzig. https://openlibrary.org/books/OL20477955M/Grundlegung_der_politischen_Oekonomie

White, Halbert. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817-838. https://doi.org/10.2307/1912934

Yasmin, Y., & Sari, W. F. (2025). Analysis of the causality between economic growth and government spending: Wagner's law versus Keynes hypothesis. Optimum: Jurnal Ekonomi & Pembangunan, 14(2), 151-158. https://doi.org/10.12928/optimum.v14i2.8552

ISSN 3025-4450